

Pungli di Rutan, Pegawai KPK Terima Ratusan Juta dari Koruptor

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyidangkan 93 pegawai lembaga antirasuah yang diduga terlibat pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Sidang etik itu direncanakan digelar Januari ini.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menyatakan, dalam praktiknya, pegawai KPK tersebut me-raup uang puluhan hingga ratusan juta. Uang itu tersebut diminta dari tahanan agar mendapat fasilitas tambahan.

"Itu macam-macam juga. ada ratusan juta, ada

yang hanya jutaan, ada puluhan juta," kata Haris kepada wartawan, Jumat (12/1).

Besaran nominal yang diterima pegawai KPK ditentukan berdasarkan tinggi jabatannya.

"Sesuai dengan utunya, posisinya," ujar Haris.

Kendati demikian, Haris menyebut bahwa pihaknya tidak terlalu fokus dengan nominal dari pungli tersebut. Pasalnya, tugas Dewas adalah terkait pantas atau tidaknya tindakan tersebut.

"Kalau angkanya nanti tentu di penyelidikan ya, kalau di kita kan penegakan etiknya, itu kita mengadili pantas tidaknya melakukan itu," ucapnya. ● han

Bupati Labuhanbatu yang Kena OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

JAKARTA (IM) - Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Erik Adtrada Ritonga, yang tejaring operasi tangkap tangan (OTT), tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1).

Erik dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan mobil Innova Hitam. Setibanya di depan Gedung KPK sekitar pukul 09.12 WIB, ia diturunkan petugas dan dikawal seorang polisi. Erik tampak mengenakan jaket kulit warna hitam, celana hitam, topi bermotif, dan masker yang menutupi wajah. Kedua tangannya tidak diborgol.

Erik enggan menanggapi pertanyaan wartawan yang telah menunggunya di KPK. Setelah itu, Erik dibawa ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai terperiiksa. Tidak lama setelah Erik

masuk, seorang pria juga digelandang petugas KPK. Ia mencoba menghindari sorotan awak media dengan menutupi wajahnya.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Erik sudah tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah," kata Ali kepada wartawan, Jumat (12/1).

Dalam operasi senyap ini, KPK menangkap lebih dari 10 orang, termasuk anggota DPRD setempat dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun para pihak yang ditangkap itu diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango sebelumnya mengatakan, Bupati Labuhanbatu diduga terima suap terkait pengadaan barang dan jasa. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hedy Lugito (tengah) memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/1). Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah mengadakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda terkait perkara melantik Anggota Bawaslu Kab. Puncak, Papua Tengah, Guripa Telengen yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Bawaslu dan terindikasi tergabung dalam organisasi terlarang.

Peretasan HP Pimpinan DKPP Dinilai Bentuk Intimidasi ala Orba

Peretasan HP pimpinan DKPP diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang diproses DKPP. Peretasan ini dinilai sebagai intimidasi untuk DKPP.

JAKARTA (IM) - Ponsel milik Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hedy Lugito beserta dua anggotanya Ratna Dewi Pettalolo dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, diretas pada Selasa (9/1) dini hari.

Peretasan tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi. Sebab hal itu terjadi saat mereka sedang menanggapi proses hukum dugaan pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka itu dinilai sebagai bentuk intimidasi.

Mantan Sekjen Partai

Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto alias Peter Hari menduga, peretasan tersebut ada kaitannya dengan kasus yang kini ditangani DKPP. Ia menyebut bahwa peretasan tersebut bagian dari intimidasi terhadap DKPP yang sedang memproses dugaan pelanggaran etik KPU.

"Kami menduga peretasan mereka ada kaitannya dengan kasus aduan kami yang sedang diproses DKPP," kata Peter dalam keterangan resminya, Kamis (11/1).

Menurutnya, ada upaya sistematis agar DKPP tidak membuat putusan yang

dapat merugikan nama baik KPU. Sebab, bilamana KPU mendapat sanksi, maka proses penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak mendapat legitimasi moral dan etik.

"Kami mengancam karena ada upaya melakukan intimidasi kepada DKPP, agar tidak membuat keputusan yang merugikan KPU. Bila KPU mendapat sanksi, legitimasi secara etik dan bahkan hukum dalam menetapkan Prabowo-Gibran sebagai paslon Pilpres 2024 kembali dipertanyakan," tegasnya.

Intimidasi dengan cara meretas ponsel ini mengindikasikan keberulangan cara-cara yang digunakan era Orde Baru (Orba) untuk membungkam suara kritis masyarakat. Bedanya, cara yang digunakan melalui teknologi.

"Cara-cara seperti ini adalah cara Orde Baru dengan desain kekinian, yakni meretas alat komunikasi dan melakukan intimidasi dalam memenangkan pilpres," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini, DKPP sedang memproses kasus dugaan pelanggaran etik para komisioner KPU RI. Para komisioner KPU RI dinilai melanggar etik karena menerima Gibran Rakabuming (36) sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Padahal, syarat usia capres-cawapres dalam Peraturan KPU tentang Pilpres masih minimum 40 tahun tanpa syarat alternatif.

Peter bersama tiga aktivis Pro Demokrasi yakni Tendry Masenggi, dan Azwar Furgudiyama, memberi kuasa kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 yang diketuai Patra M. Zen mengadakan KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

KPU dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena menetapkan Gibran sebagai Cawapres, tanpa merevisi peraturan KPU lama yang masih mensyaratkan usia minimal 40 gap capres dan cawapres. Oleh karena itu, mereka meminta kepada DKPP agar memecat seluruh anggota Komisioner KPU.

Dalam sidang kedua yang

dipimpin Ketua DKPP Hedy Lugito, pengugat mencera dengan pertanyaan kepada saksi dari Bawaslu dan Kemkumham. Dari jawaban yang disampaikan, ditemukan bukti bahwa Bawaslu tidak menerima berkas verifikasi Prabowo Gibran.

Bawaslu mengatakan bahwa dalam proses verifikasi, tidak bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon karena masih menggunakan UU Pemilu dan peraturan KPU No 19/2023 sebagai dasar hukum penerimaan pendaftaran capres dan cawapres.

"Jadi itu menjelaskan kenapa mereka tidak bisa akses silon. Harusnya Gibran itu dicoret namanya, karena belum usia 40 tahun itu tanggal 29 Oktober," kata Patra.

Sementara, saksi dari Kemkumham tidak bisa menjawab apakah peraturan KPU yang direvisi dan disahkan pada tanggal 3 November 2023 bisa berlaku surut. TPDI 2.0 menilai, aturan itu seharusnya perlu diberlakukan untuk pilpres 2029.

Rencananya, DKPP akan kembali menggelar sidang ketiga pada Senin (15/1) mendatang dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan daru pengadu, jawaban teradu, dan mendengarkan keterangan pihak terkait serta saksi. ● han

Anies Baswedan Janji akan Kolaborasi Bersama Pengusaha Berantas Pungli

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, ia berjanji akan berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk memberantas pungutan liar (pungli) di Indonesia.

Anies mengatakan hal ini usai dialog bersama organisasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta Theater, Kamis (11/1) malam.

"Pelaku usaha yang lebih tahu di mana terjadinya pungli, kapan terjadi pungli, berapa besar terjadinya pungli," kata Anies.

Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik-praktik pungli yang harus diberantas," katanya menambahkan.

Anies menilai, pungli terjadi karena adanya sistem yang kurang mumpuni untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Sebab itu, kata Anies, langkah pertama memberantas pungli dengan cara memperbaiki sistem untuk menutupi celah pungutan liar.

"Yang kedua adalah terkait dengan aktor, dan ketika terkait dengan aktor, pemberesan pungli tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, yang lebih tahu pungli itu adalah pelaku usaha," katanya.

Sebab itu, kata Anies, diperlukan kolaborasi agar pungli bisa diberantas habis dengan paripurna.

"Komitmennya adalah kita harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat," tandasnya. ● mei



PEMERIKSAAN LANJUTAN KAREN AGUSTIAWAN DI KPK Tersangka kasus dugaan korupsi Karen Agustawan berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Dirut Pertamina periode 2009-2014 tersebut terkait kasus dugaan korupsi penentuan kebijakan pengadaan gas alam cair di PT Pertamina 2011-2021 yang merugikan negara Rp2,1 triliun.

Mahfud MD Janji akan Beri Gaji Terhadap Seluruh Guru Agama

PASURUAN (IM) - Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berjanji jika menang Pilpres 2024 akan memberikan gaji kepada seluruh guru agama. Gaji dibayar jika mereka mengajar.

"Kita sama, agama lain juga kalau ada spesifikasi sama mengajar ya misalnya, agama Hindu, ngajar kok dengan pengabdian tidak ada yang gaji, ya kita bayar," kata Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1).

Setiap guru agama akan didata berapa jam mengajar dalam sepekan. Apabila masih ada guru agama yang dibayar secara sukarela akan didaftarkan untuk mendapatkan gaji.

"Ngajarnya di mana, berapa jam seminggu, itu kan penghasilan minimal yang harus diberikan berapa. Kalau Kristen misalnya, sama, kalau ada sekolah-sekolah Kristen begitu, kalau ndak ada yang gaji karena kesukarelaan kita daftar, meskipun kalau Kristen biasanya dananya sudah diatur ya untuk setiap misionaris ya," ujarnya.

Sebelumnya, saat mengunjungi Madura, Mahfud Md memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan bersama

capres Ganjar Pranowo, salah satunya terkait penghasilan tetap untuk guru ngaji dan marbot. Mahfud mengatakan penghasilan tetap itu nantinya tidak seperti bantuan langsung tunai (BLT) Rp 300 ribu.

"Kami punya program, besok guru-guru madrasah ini, guru-guru ngaji, marbot-marbot masjid itu harus dicarikan penghasilan yang tetap. Bukan sekadar BLT Rp 300 ribu sebulan, seberapa itu. Dan ndak ndelok juga, ndak ndelok itu nggak kebagian," kata Mahfud di acara Halaqoh Kebangsaan Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Madura di Ponpes Darul Ulum Al Wahidiyah 2, Omben, Sampang, Madura, Kamis (11/1).

Menurut Mahfud penerima BLT kerap kali salah sasaran. Dia mengatakan kerap ada kesalahan terkait administrasi pendataan penerima BLT. "Itu BLT-BLT itu kadang kala salah sasaran, karena administrasi kependudukannya salah orang, ada yang dapat dua kali, yang seharusnya dapat nggak dapat. Yang pejabat daftar dapat. Ada orang mati juga masih didaftarkan itu diambil oleh petugas biasanya," ujarnya. ● mei

Prabowo Ingin Suplai Pupuk Langsung ke Petani, Jangan Diperdagangkan

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, jika terpilih menjadi presiden, ia menginginkan suplai pupuk langsung diterima. Hal itu ditegaskannya dalam diskusi capres bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

"Jadi keberpihakan, pengelolaan pupuk harus ke petani," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan moderator.

Pria yang kini menjabat Menteri Pertahanan juga ingin pupuk tidak diperdagangkan atau melalui perantara.

"Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi

untuk rakyat, benih dan sebagainya," ucap Prabowo.

"Karena itu sangat penting Saudara-saudara punya kelompok-kelompok tani, koperasi-koperasi yang Saudara harus mengatur kelompok-kelompok tani harus Saudara-saudara atur sebaik-baiknya," katanya.

Petani Harus Makmur

Prabowo meniai kualitas hidup petani di Indonesia saat ini kurang baik. Hal ini menjadi alasan jumlah petani menyusut dari tahun ke tahun.

Sebab itu, ia ingin memakmurkan petani Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta

petani pada 2013.

"Kenapa berkurang (jumlah) petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah, nilai tukarnya tidak cocok," ujarnya dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin, Jumat (12/1).

Penyebab kualitas hidup petani Indonesia yang kurang layak, salah satunya disebabkan oleh sistem ekonomi pasar terbuka yang merupakan bagian dari kapitalisme. Dengan sistem tersebut, Indonesia dapat mengimpor komoditas pangan dengan harga lebih murah dari negara mitra dagang.

"Semua dianggap harus free market, ...Free market benar, tapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan," kata Prabowo.

● han



PERINGATAN HARI DHARMA SAMUDERA

Dankodiklat Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah (kedua kanan) melakukan penghormatan saat berziarah di TMP Sepuluh November, Surabaya, Jatim, Jumat (12/1). Peringatan Hari Dharma Samudera tersebut merupakan bentuk penghormatan para prajurit TNI AL kepada para pahlawan yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan RI dalam pertempuran Laut Aru yang terjadi pada 15 Januari 1962. A

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta tertanggal 14 Desember 2023 nomor 26, dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PT Tirta Sarana Mutiara, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") telah memutuskan untuk melikuidasi Perseroan tertanggal sejak tanggal 14 Desember 2023 dan mengangkat Nyonya Lidwina Linggawaty Setionegoro sebagai likuidator Perseroan.

Memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, segala bentuk tagihan dan/atau keberatan atas likuidasi Perseroan dapat diajukan secara tertulis disertai bukti pendukung yang sah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

Likuidator Perseroan
Jl. Bangka Raya No. 29A, Pella Mampang
Jakarta Selatan

Jakarta, 13 Januari 2024
Likuidator
PT Tirta Sarana Mutiara
(Dalam Likuidasi)